

4	31 Januari 2022 117/LSM.JAPATI/BANTEN /I/2022	Ketua LSM JAPATI (Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemuda Anti Korupsi) Sekretariat Bersama BAP 1 Blok VI No. 17	Permohonan klarifikasi data dan informasi pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah TA 2021.													
5	31 Januari 2022 118/LSM.JAPATI/BANTEN /I/2022	Ketua LSM JAPATI (Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemuda Anti Korupsi) Sekretariat Bersama BAP 1 Blok VI No. 17	Permohonan klarifikasi data dan informasi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah TA 2021.													
6	03 Februari 2022 018/Pri-KIP/II/2022	Moch Ojat Sudrajat Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang mulya, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	<p>1. Surat perjanjian terbaru atau dokumen yang sejenis tentang penggunaan barang milik daerah berupa gedung/ bangunan yang digunakan sebagai kantor oleh PT. Agribisnis Banten Mandiri (PT.ABM)</p> <p>2. Dasar pertimbangan keputusan dan/atau kebijakan penempatan dan penggunaan gedung di komplek gedung negara (pendopo lama) provinsi banten sebagai kantor PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau dokumen yang sejenis.</p> <p>3. Dokumen persetujuan dari gubernur banten atas usulan dari pengelolaan barang berkaitan dengan pemanfaatan dan penempatan gedung di komplek gedung negara (pendopo lama) provinsi banten di jalan Brigjen KH. Syam'un, sebagai kantor PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau dokumen sejenis.</p>	<p>1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan suatu keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.</p> <p>2. meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.</p> <p>4. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</p> <p>5. untuk meneliti, mencermati.</p>						✓						

7	05 April 2022 022/MBI-KIP/IV/2022	Moch Ojat Sudrajat Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang mulya, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak HAPID, S.HI, MH BTN Narimbang RT 005/RW 007 Kel. Jatimulya, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak Provinsi Banten.	<p>1. surat perjanjian terbaru tentang penggunaan barang milik daerah berupa Banten Mandiri (PT. ABM) di komplek gedung (pendopo lama) apakah tetap pinjam pakai atau disewa? Jika disewa berapakah besaran nilai sewa atas gedung tersebut dan dalam jangka waktu berapa lama gedung tersebut disewa? atau dokumen sejenis.</p> <p>2. dasar hukum dan dasar pertimbangan keputusan dipinjam pakai atau disewa atas gedung sebagai kantor BUMD PT. Agrobisnis Banten Mandiri (PT. ABM) di komplek Gedung Negara (Pendopo Lama) atau dokumen yang sejenis.</p> <p>3. dokumen persetujuan dari gubernur banten atas usulan dari pengelolaan barang berkaitan dengan pemanfaatan dan penempatan gedung di komplek gedung negara (pendopo lama).</p> <p>4. dasar hukum dan dasar pertimbangan/ dokumen yang sejenis atas penggunaan rumah dinas dan mobil dinas setda "defentif" provinsi banten oleh "PLT Setda Provinsi Banten".</p>	<p>1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.</p> <p>2. meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.</p> <p>4. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</p> <p>5. untuk meneliti, mencermati dan menyampaikan keberatan, pengaduan dan/atau pelaporan serta gugatan jika diketahui adanya mekanisme penggunaan maupun pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan perundang-undangan melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>							✓										
---	--------------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	31 Mei 2022 555/190- DKISP.PPID/2022	Muhammad Hidayat S	<p>1. Rekapitulasi agenda kegiatan gubernur dan wakil gubernur banten tahun 2021 dan 2022 yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemprov banten yang memuat keterangan nama kegiatan, tempat kegiatan dan tanggal kegiatan.</p> <p>2. Rekapitulasi agenda rapat gubernur dan wakil gubernur banten tahun 2021 dan 2022 yang memuat keterangan tanggal rapat, tempat rapat, agenda rapat, kesimpulan hasil rapat.</p>	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.						✓	Perpanjangan waktu pada surat No. 225/09-TU.Umum/VI/2022				
---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--